



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintaha Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam secretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan asset daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan

- desa dan bertanggungjawab kepada Bupati.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 15. Daerah adalah Kabupaten Buol.
 16. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang diterima Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam perubahan APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan BPD, dan insentif lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengalokasian ADD terdiri atas:
 - a. alokasi Dasar yang dibagi Rata di setiap Desa sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. alokasi Formula yang di hitung secara Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan keterjangkauan.
- (5) Sumber Data dalam Perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari :
 - a. jumlah Penduduk Miskin berasal dari Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Desil 1 Kementerian PMK Republik Indonesia melalui Bappeda Litbang Daerah.

- b. jumlah Penduduk berasal dari Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
 - c. luas Wilayah dan Keterjangkauan berasal dari Badan Pusat Statistik Daerah.
- (6) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dikecualikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahap satu 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap dua 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap tiga 20 % (dua puluh persen).
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD disalurkan ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan setiap bulan ke rekening kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Kepala Desa dan mengirimkan nomor Rekening Desa tersebut kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer langsung ke Rekening Kas Desa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Penyaluran ADD yang sudah dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dan ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa dan membuat surat permintaan pembayaran pada aplikasi sistem keuangan Desa sebagaimana jumlah dana yang akan dicairkan setiap pencairan sesuai rencana anggaran kebutuhan Desa.

Pasal 6

Sebelum penyaluran dana dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyusun dan menyampaikan rincian dana setiap Desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa tidak dapat menerima transfer ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila belum menetapkan dan melaporkan terkait dengan dokumen sebagai berikut:
- a. RPJMDesa;
 - b. peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;
 - c. peraturan Desa tentang RKPDesa berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 - d. berita acara persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD tentang penetapan Peraturan Desa APBDesa perubahan tahun berkenaan;

- e. peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenan; dan
 - f. peraturan Desa tentang APBDesa perubahan tahun berkenan.
- (2) Selain telah menetapkan dan melaporkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemindahbukuan ADD dapat dilakukan apabila Kepala Desa :
- a. telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output dan keuangan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. telah menyampaikan laporan inventarisasi aset Desa; dan
 - c. telah melaksanakan rekonsiliasi atas pelaksanaan belanja pada APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pelaporan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerja masing-masing dan ditembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dialokasikan untuk mendanai kegiatan terdiri atas belanja:
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.
- (2) Kegiatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan BPD.
- (3) Kegiatan untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. makanan dan minuman rapat;
 - g. pakaian dinas dan atributnya;
 - h. perjalanan dinas;
 - i. upah kerja;
 - j. honorarium narasumber/ahli;
 - k. operasional Pemerintah Desa;
 - l. operasional BPD;
 - m. insentif rukun tetangga/rukun warga dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya; dan
 - n. pembelian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Kegiatan untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 20 JANUARI 2025

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol

pada tanggal 20 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



DADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 167

Dimana :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

\sum ADDM : Jumlah Keseluruhan Alokasi Dana Desa Minimal

4. Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi :

- a. jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin setempat/Jumlah Indikator pada variabel jumlah penduduk miskin se Kabupaten Buol;
- b. jumlah Indikator Pada variabel Jumlah penduduk setempat/Jumlah Indikator Pada variabel jumlah penduduk se-Kabupaten Buol;
- c. jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah setempat/Jumlah Indikator Pada variabel luas wilayah Kabupaten Buol; dan
- d. jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan setempat/Jumlah Indikator Pada variabel keterjangkauan ke Kabupaten Buol.

Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA PER DESA SE KABUPATEN BUOL
 TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | KECAMATAN / DESA | ALOKASI DASAR | ALOKASI FORMULA | PAGU ALOKASI PER DESA |
|----|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | I. LAKEA | | | |
| 1 | Desa Lakuan Buol | 332.003.525 | 272.625.021,39 | 604.628.546 |
| 2 | Desa Lakea I | 332.003.525 | 468.048.942,34 | 800.052.467 |
| 3 | Desa Lakea II | 332.003.525 | 544.567.384,50 | 876.570.910 |
| 4 | Desa Bukaan | 332.003.525 | 192.684.083,27 | 524.687.608 |
| 5 | Desa Tuinan | 332.003.525 | 393.562.828,12 | 725.566.353 |
| 6 | Desa Ngune | 332.003.525 | 165.892.731,33 | 497.896.256 |
| 7 | Desa Iambe | 332.003.525 | 209.742.937,31 | 541.746.462 |
| | JUMLAH | 2.324.024.675 | 2.247.123.928,26 | 4.571.148.603 |
| | II. KARAMAT | | | |
| 1 | Desa Mokupo | 332.003.525 | 258.311.550,94 | 590.315.076 |
| 2 | Desa Mendaan | 332.003.525 | 225.419.275,88 | 557.422.801 |
| 3 | Desa Baruga | 332.003.525 | 200.913.002,66 | 532.916.528 |
| 4 | Desa Monano | 332.003.525 | 128.186.459,71 | 460.189.985 |
| 5 | Desa Busak I | 332.003.525 | 533.862.721,41 | 865.866.246 |
| 6 | Desa Busak II | 332.003.525 | 382.077.838,39 | 714.081.363 |
| 7 | Desa Lamakan | 332.003.525 | 152.593.101,46 | 484.596.626 |
| | JUMLAH | 2.324.024.675 | 1.881.363.950,45 | 4.205.388.625 |
| | III. TILOAN | | | |
| 1 | Boilan | 332.003.525 | 134.978.800,50 | 466.982.326 |
| 2 | Kokobuka | 332.003.525 | 281.292.070,44 | 613.295.595 |
| 3 | Air Terang | 332.003.525 | 196.065.523,72 | 528.069.049 |
| 4 | Panilan Jaya | 332.003.525 | 559.959.003,36 | 891.962.528 |
| 5 | Jatimulya | 332.003.525 | 144.408.007,88 | 476.411.533 |
| 6 | Lomuli | 332.003.525 | 220.834.562,09 | 552.838.087 |
| 7 | Balau | 332.003.525 | 204.555.348,76 | 536.558.874 |
| 8 | Maniala | 332.003.525 | 136.608.931,66 | 468.612.457 |
| 9 | Monggonit | 332.003.525 | 171.667.379,37 | 503.670.904 |
| | JUMLAH | 2.988.031.725 | 2.050.369.627,78 | 5.038.401.353 |
| | IV. MOMUNU | | | |
| 1 | Momunu | 332.003.525 | 233.763.967,46 | 565.767.492 |
| 2 | Pinamula | 332.003.525 | 391.868.887,98 | 723.872.413 |
| 3 | Pujimulyo | 332.003.525 | 237.453.278,95 | 569.456.804 |
| 4 | Taluan | 332.003.525 | 342.442.604,39 | 674.446.129 |
| 5 | Potugu | 332.003.525 | 198.745.138,54 | 530.748.664 |
| 6 | Panimbul | 332.003.525 | 224.256.533,47 | 556.260.058 |
| 7 | Tongon | 332.003.525 | 222.023.488,39 | 554.027.013 |
| 8 | Lamadong II | 332.003.525 | 257.827.239,97 | 589.830.765 |
| 9 | Pomayagon | 332.003.525 | 452.179.921,60 | 784.183.447 |
| 10 | Guamonial | 332.003.525 | 112.383.858,52 | 444.387.384 |
| 11 | Lamadong I | 332.003.525 | 342.579.379,20 | 674.582.904 |
| 12 | Pajeko | 332.003.525 | 439.197.732,60 | 771.201.258 |
| 13 | Wakat | 332.003.525 | 85.239.789,96 | 417.243.315 |
| 14 | Soraya | 332.003.525 | 155.954.785,94 | 487.958.311 |
| 15 | Pinamula Baru | 332.003.525 | 52.358.114,24 | 384.361.639 |
| 16 | Mangubi | 332.003.525 | 497.529.820,17 | 829.533.345 |
| | JUMLAH | 5.312.056.400 | 4.245.804.541,38 | 9.557.860.941 |

| | | | | |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | V. BUKAL | | | |
| 1 | Biau | 332.003.525 | 191.230.123,36 | 523.233.648 |
| 2 | Bungkudu | 332.003.525 | 143.780.796,63 | 475.784.322 |
| 3 | Rantemaranu | 332.003.525 | 197.089.017,46 | 529.092.542 |
| 4 | Winangun | 332.003.525 | 241.261.738,10 | 573.265.263 |
| 5 | Modo | 332.003.525 | 201.924.926,48 | 533.928.451 |
| 6 | Unone | 332.003.525 | 190.963.497,67 | 522.967.023 |
| 7 | Mopu | 332.003.525 | 208.516.782,98 | 540.520.308 |
| 8 | Diat | 332.003.525 | 190.331.935,40 | 522.335.460 |
| 9 | Potangoan | 332.003.525 | 263.344.605,22 | 595.348.130 |
| 10 | Binuang | 332.003.525 | 94.606.935,29 | 426.610.460 |
| 11 | Yugut | 332.003.525 | 230.278.328,81 | 562.281.854 |
| 12 | Mooyong | 332.003.525 | 117.528.996,23 | 449.532.521 |
| 13 | Mulat | 332.003.525 | 96.288.393,33 | 428.291.918 |
| 14 | Bukal | 332.003.525 | 153.653.568,46 | 485.657.093 |
| | JUMLAH | 4.648.049.350 | 2.520.799.645,42 | 7.168.848.995 |
| | VI. BOKAT | | | |
| 1 | Tayadun | 332.003.525 | 240.428.051,94 | 572.431.577 |
| 2 | Poongan | 332.003.525 | 470.051.656,71 | 802.055.182 |
| 3 | Bongo | 332.003.525 | 178.050.207,43 | 510.053.732 |
| 4 | Doulan | 332.003.525 | 128.790.349,85 | 460.793.875 |
| 5 | Kantan | 332.003.525 | 119.337.577,58 | 451.341.103 |
| 6 | Kodololagon | 332.003.525 | 243.270.144,54 | 575.273.670 |
| 7 | Negerilama | 332.003.525 | 214.896.359,39 | 546.899.884 |
| 8 | Bokat IV | 332.003.525 | 47.881.855,10 | 379.885.380 |
| 9 | Bokat | 332.003.525 | 284.787.628,66 | 616.791.154 |
| 10 | Butukan | 332.003.525 | 139.013.635,12 | 471.017.160 |
| 11 | Tikopo | 332.003.525 | 59.245.235,83 | 391.248.761 |
| 12 | Bukamog | 332.003.525 | 148.768.731,70 | 480.772.257 |
| 13 | Tang | 332.003.525 | 102.078.688,49 | 434.082.213 |
| 14 | Duamayo | 332.003.525 | 95.403.227,03 | 427.406.752 |
| 15 | Langudon | 332.003.525 | 60.074.617,64 | 392.078.143 |
| | JUMLAH | 4.980.052.875 | 2.532.077.967,01 | 7.512.130.842 |
| | VII. BUNOBOGU | | | |
| 1 | Desa Lonu | 332.003.525 | 301.855.374,61 | 633.858.900 |
| 2 | Desa Tarnit | 332.003.525 | 130.345.969,37 | 462.349.494 |
| 3 | Desa Botugolu | 332.003.525 | 148.095.478,79 | 480.099.004 |
| 4 | Desa Bunobogu | 332.003.525 | 154.766.097,04 | 486.769.622 |
| 5 | Desa Konamakan | 332.003.525 | 141.160.065,51 | 473.163.591 |
| 6 | Desa Ponipingan | 332.003.525 | 171.571.094,44 | 503.574.619 |
| 7 | Desa Inalatan | 332.003.525 | 164.598.017,54 | 496.601.543 |
| 8 | Desa Domag Mekar | 332.003.525 | 226.061.766,61 | 558.065.292 |
| 9 | Desa Bunobogu Selatan | 332.003.525 | 99.645.210,60 | 431.648.736 |
| 10 | Desa Pokobo | 332.003.525 | 129.728.804,72 | 461.732.330 |
| | JUMLAH | 3.320.035.250 | 1.667.827.879,23 | 4.987.863.129 |
| | VIII. GADUNG | | | |
| 1 | Lokodidi | 332.003.525 | 206.453.082,22 | 538.456.607 |
| 2 | Matinan | 332.003.525 | 190.522.186,84 | 522.525.712 |
| 3 | Taat | 332.003.525 | 163.821.661,55 | 495.825.187 |
| 4 | Lokodoka | 332.003.525 | 344.738.586,30 | 676.742.111 |
| 5 | Labuton | 332.003.525 | 329.847.137,03 | 661.850.662 |
| 6 | Bulagidun | 332.003.525 | 196.145.253,88 | 528.148.779 |
| 7 | Diapatih | 332.003.525 | 198.322.106,81 | 530.325.632 |
| 8 | Nandu | 332.003.525 | 196.633.371,83 | 528.636.897 |
| 9 | Lipubogu | 332.003.525 | 206.878.864,27 | 538.882.389 |
| 10 | Bulagidun Tanjung | 332.003.525 | 159.419.729,20 | 491.423.254 |
| 11 | Pandangan | 332.003.525 | 123.043.435,20 | 455.046.960 |
| | JUMLAH | 3.652.038.775 | 2.315.825.415,13 | 5.967.864.190 |

| IX. PALELEH BARAT | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Desa Bodi | 332.003.525 | 207.073.270,13 | 539.076.795 |
| 2 | Desa Tayokan | 332.003.525 | 149.390.275,53 | 481.393.801 |
| 3 | Desa Harmoni | 332.003.525 | 240.416.931,32 | 572.420.456 |
| 4 | Desa Lunguto | 332.003.525 | 191.318.356,79 | 523.321.882 |
| 5 | Desa Timbulon | 332.003.525 | 465.623.550,71 | 797.627.076 |
| 6 | Desa Oyak | 332.003.525 | 217.433.234,61 | 549.436.760 |
| 7 | Desa Hulubalang | 332.003.525 | 140.157.054,76 | 472.160.580 |
| JUMLAH | | 2.324.024.675 | 1.611.412.673,85 | 3.935.437.349 |
| X. PALELEH | | | | |
| 1 | Umu | 332.003.525 | 152.506.608,73 | 484.510.134 |
| 2 | Molangato | 332.003.525 | 304.560.141,17 | 636.563.666 |
| 3 | Lilito | 332.003.525 | 143.771.049,01 | 475.774.574 |
| 4 | Talaki | 332.003.525 | 393.176.152,13 | 725.179.677 |
| 5 | Baturata | 332.003.525 | 204.371.365,66 | 536.374.891 |
| 6 | Kwalabesar | 332.003.525 | 339.134.613,09 | 671.138.138 |
| 7 | Tolau | 332.003.525 | 238.814.120,44 | 570.817.645 |
| 8 | Paleleh | 332.003.525 | 234.705.293,32 | 566.708.818 |
| 9 | Lintidu | 332.003.525 | 181.441.679,74 | 513.445.205 |
| 10 | Pionoto | 332.003.525 | 250.353.199,25 | 582.356.724 |
| 11 | Dopalak | 332.003.525 | 150.951.217,85 | 482.954.743 |
| 12 | Dotuno | 332.003.525 | 237.862.731,10 | 569.866.256 |
| JUMLAH | | 3.984.042.300 | 2.831.648.171,49 | 6.815.690.471 |

